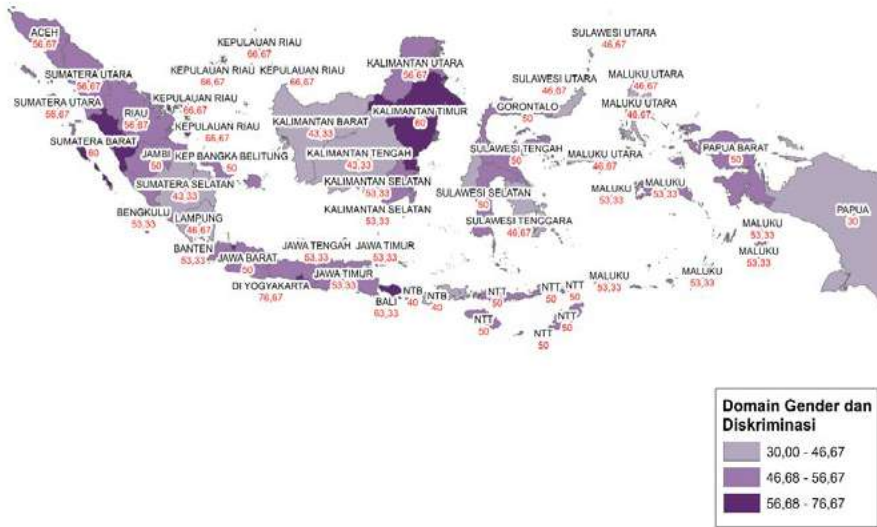


Gambar 2. 7 Peta Persebaran IPP Domain Gender dan Diskriminasi



Berdasarkan indikator yang membentuknya, Tabel 2.6 juga menunjukkan bahwa ketimpangan yang cukup tinggi juga terjadi pada indikator persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Nilai standar deviasi indikator persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah adalah sebesar 6,28 dan indikator persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah secara nasional adalah sebesar 41,79 dimana nilai tertinggi (62,68) dan terendah (29,93) dari indikator tersebut menjauhi nilai secara nasional. Nilai standar deviasi indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal adalah sebesar 7,25 dan rata – ratanya sebesar 23,08 dimana nilai tertinggi (41,50) dan terendah (5,29) dari indikator tersebut menjauhi nilai indikator tersebut secara nasional.

Tabel 2.6 IPP Domain Gender dan Diskriminasi di 34 Provinsi

Provinsi	Angka Perkawinan Usia Anak	Persentase Pemuda Perempuan yang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi	Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal	Domain Gender dan Diskriminasi
Aceh	3.16	49.80	17.16	56.67
Sumatera Utara	2.38	46.79	23.56	56.67
Sumatera Barat	4.00	55.18	20.54	60.00
Riau	3.45	47.83	20.85	56.67
Jambi	6.89	42.10	20.82	50.00
Sumatera Selatan	11.41	36.26	22.11	43.33
Bengkulu	7.01	48.33	20.07	53.33

Provinsi	Angka Perkawinan Usia Anak	Persentase Pemuda Perempuan yang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi	Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal	Domain Gender dan Diskriminasi
Lampung	7.11	38.64	18.85	46.67
Kepulauan Bangka Belitung	8.93	34.18	27.12	50.00
Kepulauan Riau	0.88	41.43	38.18	66.67
DKI Jakarta	2.12	39.34	37.92	63.33
Jawa Barat	6.79	37.96	24.74	50.00
Jawa Tengah	7.82	38.88	30.15	53.33
DI Yogyakarta	2.05	62.68	37.70	76.67
Jawa Timur	8.86	42.26	25.45	53.33
Banten	3.86	38.99	26.96	53.33
Bali	4.71	46.62	41.50	63.33
Nusa Tenggara Barat	17.32	40.15	20.68	40.00
Nusa Tenggara Timur	4.97	43.03	16.44	50.00
Kalimantan Barat	11.29	39.91	20.67	43.33
Kalimantan Tengah	10.94	37.21	20.89	43.33
Kalimantan Selatan	8.74	41.61	26.11	53.33
Kalimantan Timur	6.30	48.34	28.10	60.00
Kalimantan Utara	8.01	47.98	24.51	56.67
Sulawesi Utara	10.15	40.97	19.35	46.67
Sulawesi Tengah	8.91	46.62	18.42	50.00
Sulawesi Selatan	7.48	44.92	20.69	50.00
Sulawesi Tenggara	10.43	47.29	20.11	46.67
Gorontalo	10.91	48.60	23.81	50.00
Sulawesi Barat	11.25	42.61	14.43	43.33
Maluku	5.11	53.43	14.77	53.33
Maluku Utara	7.30	45.73	16.63	46.67

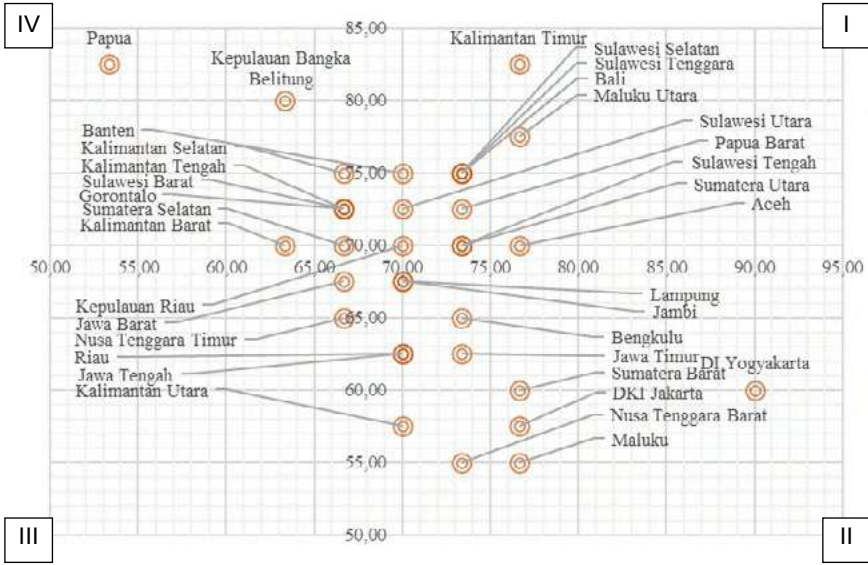
Provinsi	Angka Perkawinan Usia Anak	Persentase Pemuda Perempuan yang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi	Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal	Domain Gender dan Diskriminasi
Papua Barat	7.86	47.84	14.13	50.00
Papua	11.19	29.93	5.29	30.00
Indonesia	6.92	41.79	24.71	53.33
Nilai Tertinggi	17.32	62.68	41.50	76.67
Nilai Terendah	0.88	29.93	5.29	30.00
Standar Deviasi	3.46	6.28	7.52	8.45

Berbeda dengan dua indikator lainnya, ketimpangan indikator angka perkawinan anak pada domain gender dan diskriminasi relatif rendah. Standar deviasi indikator tersebut adalah sebesar 3,46 dan nilai angka perkawinan anak adalah sebesar 6,92. Nilai tertinggi yang sebesar 17,32 dan terendah sebesar 0,88 relatif mendekati nilai indikator angka perkawinan anak secara nasional.

2.3 Tipologi Provinsi Berdasarkan Domain Indeks Pembangunan Pemuda

Selain melihat persebaran dan nilai IPP setiap domain, analisis terhadap tipologi setiap provinsi perlu juga dilakukan untuk mengetahui karakteristik masing – masing provinsi tersebut. Penentuan tipologi dilakukan dengan memetakan seluruh provinsi berdasarkan dua domain yang telah ditentukan. Titik origin kuadran merupakan nilai IPP nasional pada domain yang dianalisis, sehingga dapat diketahui apakah suatu provinsi memiliki nilai IPP Domain diatas nilai IPP nasional atau di bawahnya.

Gambar 2. 8 Tipologi Provinsi Berdasarkan Domain Pendidikan dan Kesehatan dan Kesejahteraan Pemuda



Berdasarkan domain pendidikan dan kesehatan dan kesejahteraan pemuda, Gambar 2.8 menunjukkan bahwa terdapat empat kuadran. Kuadran I merupakan provinsi yang memiliki nilai IPP domain pendidikan dan kesehatan dan kesejahteraan pemuda diatas IPP domain tersebut secara nasional. Kuadran II merupakan provinsi yang memiliki nilai IPP domain pendidikan lebih tinggi dibandingkan IPP domain pendidikan nasional dan memiliki IPP domain kesehatan dan kesejahteraan pemuda di bawah IPP domain kesehatan dan kesejahteraan nasional. Kuadran III merupakan provinsi yang memiliki nilai IPP domain pendidikan lebih rendah dibandingkan IPP domain pendidikan nasional dan memiliki IPP domain kesehatan dan kesejahteraan pemuda di bawah IPP domain kesehatan dan kesejahteraan nasional. Kuadran IV merupakan provinsi yang memiliki nilai IPP domain pendidikan lebih rendah dibandingkan IPP domain pendidikan nasional dan memiliki IPP domain kesehatan dan kesejahteraan pemuda diatas IPP domain kesehatan dan kesejahteraan nasional. Kuadran I terdiri dari Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah. Kuadran II terdiri dari DI Yogyakarta, Maluku, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Bengkulu. Kuadran III terdiri dari Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat. Kuadran IV terdiri dari Papua, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Selain itu, provinsi lain tersebar pada garis sumbu X (domain pendidikan) atau sumbu Y (domain kesehatan dan kesejahteraan).

Posisi klasifikasi setiap provinsi menentukan langkah dan kebijakan yang harus dilakukan oleh provinsi tersebut untuk mendorong kinerja pembangunan pemuda di daerahnya. Kuadran II menunjukkan bahwa provinsi yang berada di Klasifikasi tersebut seyogyanya lebih memperhatikan kebijakan terkait dengan domain kesehatan dan kesejahteraan. Kuadran IV menunjukkan bahwa provinsi yang berada pada klasifikasi tersebut untuk lebih memfokus kebijakan terkait dengan domain pendidikan. Kondisi berbeda terlihat pada kuadran III dimana provinsi yang berada klasifikasi tersebut harus memperhatikan kedua domain tersebut dalam kebijakan yang akan diambil.

Jika disandingkan antara domain pendidikan dengan lapangan dan kesempatan kerja, Gambar 2.9 menunjukkan bahwa Jawa Barat dan Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi yang memiliki nilai IPP domain pendidikan dan lapangan dan kesempatan kerja di bawah IPP domain pendidikan dan lapangan dan kesempatan kerja nasional. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kepulauan Bangka Belitung seyogyanya mendorong kebijakan yang mengarah pada perbaikan pendidikan dan kesempatan kerja.